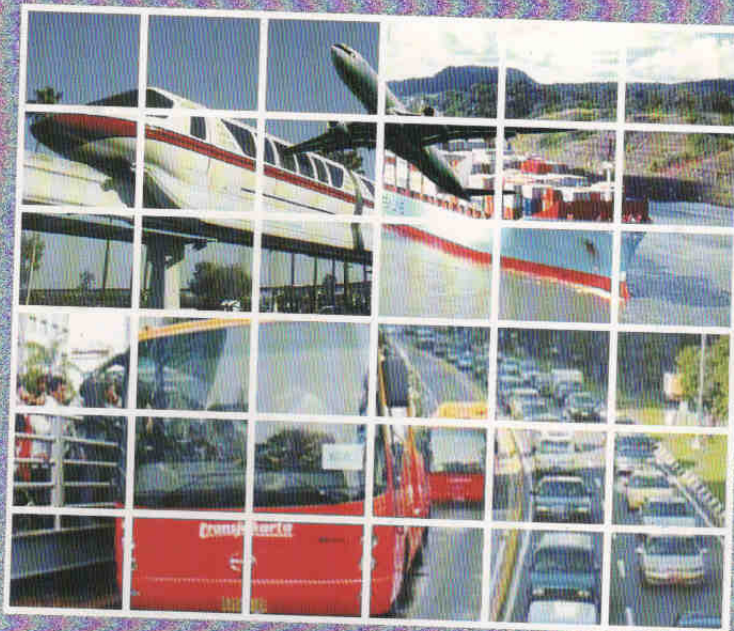


Volume 20, Nomer 10, Tahun 2008

ISSN. 0852-1824  
STT NO. 16688

# Warta Penelitian Perhubungan



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN R.I.  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

## DAFTAR ISI

Evaluasi Pemisahan Status Pengelolaan Kereta Api Jabodetabek <i>Puruoko</i>	1470
Profil Angkutan Kereta Api Ekonomi Jabotabek Lintas Bekasi-Jakarta Kota <i>Rosita Sinaga dan Sri Lestari</i>	1478
Evaluasi Pelayanan Navigasi Penerbangan Di Bandara Adisucipto Yogyakarta <i>Lolo Kustoro</i>	1498
Kajian Upaya Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi Dalam Rangka Peningkatan SDM Pada Dinas Perhubungan <i>Besar Setyabudi dan Nurdjanah</i>	1519
Analisis Getaran Kapal Layar Motor Prototype Pinisi 360 GRT (Vibration Analysis Of Motor Sail Ship For Prototype Pinisi 360 GRT) <i>Pilus Raga</i>	1537
Pengkajian Kinerja Fasilitas Pelayanan Di Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta <i>Ari Susetyadi</i>	1544
Kajian Pengaruh Pengoperasian Busway Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Di DKI Jakarta Guna Menekan Kemacetan <i>Sri Atun dan Noviyanti</i>	1560
Pemeliharaan Kekuatan Dan Keawetan Jalan Rel Dan Jalan Raya Serta Pengadaan Prasarana Transportasi Sungai Di DKI Jakarta <i>Kusmanto Sirait</i>	1574



# EVALUASI PEMISAHAN STATUS PENGELOLAAN KERETA API JABODETABEK Purwoko \*)

## ABSTRAK

Perubahan status Penyelenggaraan Kereta Api dari tahun 1939 - 1998 terjadi lima kali perubahan hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2007, pola operator tunggal atau monopoli operator kereta api telah berakhir.

Seiring bergulirnya undang-undang perkeretaapian yang baru, terjadi perubahan pemisahan kereta api Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek dengan induknya (*spin off*). Sehingga dengan perubahan status diharapkan peningkatan pelayanan semakin dirasakan oleh masyarakat. Namun untuk saat sekarang perubahan tersebut baru tingkat manajemen, karena masih banyak faktor yang harus diselesaikan baik secara teknis maupun non teknis.

**Kata Kunci :** Perubahan Status Kereta Api Jabodetabek

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah dilaksanakan, maka sejak diberlakukan undang-undang tersebut, pola operator tunggal atau monopoli operator kereta api telah berakhir. Sehingga peluang Pemerintah Daerah dan swasta terbuka lebar untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan angkutan kereta api, hal ini terkait karena dengan adanya multi operator. Walaupun peluang kebebasan telah terbuka lebar, namun perlu dengan seksama suatu pertimbangan dalam memberikan izin terhadap pihak swasta baik asing maupun dalam negeri apakah telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perkeretaapian yang telah ditetapkan.

Seiring bergulirnya undang-undang perkeretaapian yang baru, terjadi juga perubahan status dimana angkutan perkotaan kereta api Jabodetabek menjadi PT Kereta Api Jabodetabek yaitu pemisahan dari induknya (*spin off*). Pemisahan status tersebut baru sebatas manajemen atau organisasi saja, tetapi secara keseluruhan belum bisa dilaksanakan pengoperasian karena masih banyak permasalahan yang harus dihadapi atau dibenahi baik secara teknis operasional atau masalah lainnya terkait sarana prasarana dan factor penunjang yang lain.

Perubahan status kereta api menjadi PT. Kereta Api Jabodetabek merupakan langkah maju di bidang angkutan perkeretaapian sebagai angkutan massal. Untuk menjaga agar proses kemajuan ini tetap berkualitas tinggi dalam pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu dilaksanakan pengawasan sedini mungkin baik secara teknis maupun non teknis agar organisasi baru ini tidak terjadi suatu penyimpangan, maka perlu adanya transparansi baik dari pemerintah atau masyarakat untuk melakukan pemisahan. Sehingga pemisahan (*spin off*) menghasilkan harapan sesuai dengan rencana proses kemajuan di bidang perkeretaapian Indonesia, yang baru terbentuk didalam manajemen angkutan massal khususnya di wilayah Jabodetabek.